

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024

Ammar Muhammad Zain¹, Henryanto Wijaya²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ,
Universitas Tarumanagara Jakarta

ammarmuhammadzain@gmail.com¹, henryantow@fe.untar.ac.id²

ABSTRACT.

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and General Allocation Fund (DAU) on Economic Growth in Central Java Province during 2022–2024. The research applies a quantitative approach with panel data regression and associative analysis. The data used are secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Central Java Province. The sample includes 35 regencies and cities observed over three years. The results show that PAD has a positive and significant effect on economic growth, indicating that higher fiscal independence can stimulate regional economic activity. Capital expenditure also has a positive influence, emphasizing the importance of local government investment in productive sectors such as infrastructure and public services. Meanwhile, the General Allocation Fund (DAU) shows a positive but varying effect across regions, depending on management efficiency and allocation effectiveness. Overall, the study highlights that the synergy among PAD, capital expenditure, and DAU plays a crucial role in strengthening regional fiscal capacity to achieve sustainable economic growth in Central Java Province.

Keywords: *Regional Original Revenue; Capital Expenditure; General Allocation Fund; Economic Growth; Central Java*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan bersifat asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian mencakup 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tiga tahun pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal mampu mendorong aktivitas ekonomi regional. Belanja modal juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menegaskan pentingnya investasi pemerintah daerah dalam sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif namun bervariasi antar daerah, tergantung pada efektivitas pengelolaan dan alokasi penggunaannya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara PAD, belanja modal, dan DAU merupakan faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Dana Alokasi Umum; Pertumbuhan Ekonomi; Jawa Tengah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan republik dan dipimpin oleh seorang Presiden. Dalam kerangka negara kesatuan tersebut, pembagian wilayah administrasi dilakukan ke dalam beberapa tingkatan,

yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah agar mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendapatan yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah (Abdul Halim, 2004:94).

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan luas kepada daerah, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal sebagian besar pemerintah daerah terhadap transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), masih tinggi, yakni mencapai lebih dari 60% dari total pendapatan daerah pada tahun 2023. Di sisi lain, alokasi belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah masih rendah dibandingkan total APBD, rata-rata hanya berkisar 18–25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,02%, masih di bawah rata-rata nasional yaitu 5,11% (BPS, 2023). Dengan demikian, dibutuhkan analisis empiris untuk menilai sejauh mana PAD, belanja modal, dan DAU benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan mencerminkan elemen penting dari struktur keuangan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal, yang kesemuanya memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketiga variabel tersebut tidak hanya bersifat teknokratis dalam kerangka pengelolaan fiskal, namun juga dapat dianalisis secara konseptual melalui perspektif Teori Keagenan (Agency Theory). Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen, keputusan alokasi dan penggunaan anggaran menjadi instrumen utama untuk mengukur efektivitas pelimpahan kewenangan dalam sistem desentralisasi fiskal (Jensen, 1976). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan kemandirian fiskal daerah, di mana semakin tinggi PAD berarti semakin kuat kinerja agen dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal (Dwi Anggoro, 2018). Sementara itu, DAU mencerminkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat guna mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila penggunaannya tidak produktif. Adapun belanja modal menggambarkan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mampu menimbulkan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi (Sukmawati, 2021). Dengan demikian, hubungan keagenan menjadi kerangka teoritis penting dalam menjelaskan sejauh mana kinerja fiskal daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami peran sinergis antara PAD, belanja modal, dan DAU dalam membentuk struktur ekonomi daerah

yang tangguh. Daerah dengan PAD tinggi diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengalokasikan belanja modal secara produktif guna memperkuat infrastruktur ekonomi. Namun, kenyataannya banyak daerah dengan PAD rendah masih bergantung pada DAU untuk memenuhi kebutuhan fiskal dasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketergantungan tersebut dapat melemahkan semangat kemandirian fiskal dan menghambat inovasi pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas instrumen fiskal daerah sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keragaman potensi ekonomi dan kapasitas fiskal antardaerah yang signifikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh PAD, belanja modal, dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rully Indra Prabasari (2022) menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sebaliknya, Herlan Firmansyah (2022) melaporkan bahwa hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, sementara belanja daerah dan zakat tidak berpengaruh. Dalam konteks lain, Elina Alfin Meida (2024) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, namun belanja modal tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi justru berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan empiris yang dapat disebabkan oleh karakteristik wilayah, periode penelitian, dan metode analisis yang digunakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kondisi fiskal dan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024, di mana situasi fiskal daerah sedang mengalami penyesuaian pasca-pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, banyak pemerintah daerah mengalami fluktuasi pendapatan dan belanja akibat perubahan struktur fiskal nasional. Dengan menggunakan data terbaru dan pendekatan panel data regression, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris yang lebih relevan terkait dinamika keuangan daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat analisis melalui pendekatan teori keagenan, yang menyoroti hubungan antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent dalam konteks pengelolaan dana publik (Jensen, 1976).

Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara empiris bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024. PAD merepresentasikan kemandirian fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, belanja modal menunjukkan efektivitas penggunaan sumber daya publik untuk investasi produktif, dan DAU mencerminkan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk pemerataan ekonomi antardaerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menilai kontribusi belanja modal terhadap aktivitas ekonomi regional, serta mengukur efektivitas DAU dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan pemerataan pembangunan. Dengan memahami hubungan ketiga variabel ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan empiris yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan menguji hubungan antara variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (Sugiyono, 2021). Populasi penelitian mencakup seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh (census sampling) karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta dokumen publikasi fiskal daerah yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara PAD, Belanja Modal, dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan serangkaian uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model. Uji hipotesis dilakukan melalui uji F (simultan), uji t (parsial), dan koefisien determinasi (R^2) guna mengukur signifikansi serta kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$, di mana Y mewakili pertumbuhan ekonomi, sedangkan X_1 , X_2 , dan X_3 masing-masing merepresentasikan PAD, Belanja Modal, dan DAU. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.0 atau EViews dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang akurat terkait pengaruh instrumen fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian didasarkan pada tingkat variasi fiskal dan ekonomi yang tinggi antar kabupaten/kota, di mana beberapa wilayah seperti Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Cilacap memiliki basis ekonomi industri dan jasa, sedangkan daerah lain seperti Banjarnegara, Purbalingga, dan Wonosobo lebih mengandalkan sektor pertanian. Variasi karakteristik tersebut menjadikan Jawa Tengah representatif untuk menganalisis hubungan antara variabel fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Populasi penelitian mencakup seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan karena data tersedia lengkap serta jumlah populasi relatif kecil, metode yang digunakan adalah sampling jenuh (census sampling), sehingga seluruh daerah dijadikan sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama tiga tahun (2022–2024), penelitian menghasilkan 105 unit data observasi yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Data yang digunakan bersumber dari laporan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, serta publikasi APBD pemerintah daerah. Variabel yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah; Belanja Modal berupa pengeluaran untuk aset tetap dan infrastruktur; Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer fiskal dari pemerintah pusat; serta Pertumbuhan Ekonomi yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menambah aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur publik dengan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, serta berperan penting dalam mendorong pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu dan BPS Jawa Tengah (2022–2024), nilai belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi selama periode 2022–2024. Beberapa daerah seperti Klaten, Sukoharjo, Pekalongan Kabupaten, dan Salatiga mengalami peningkatan signifikan yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur, sementara daerah lain seperti Cilacap, Boyolali, Grobogan, dan Blora mengalami penurunan akibat penyesuaian anggaran pasca-pandemi dan efisiensi fiskal. Secara umum, tren tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus ke arah pengeluaran modal yang lebih efisien dan produktif, yang diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka menengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah, diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. PAD berperan penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2025), rata-rata PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2022–2024 dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 8–15%. Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Brebes mencatat kenaikan tertinggi masing-masing sebesar 79,39%, 69,68%, dan 46,38%, sedangkan penurunan terjadi di Kebumen, Grobogan, dan Magelang. Peningkatan PAD didorong oleh digitalisasi layanan pajak daerah, efisiensi pengelolaan aset, serta pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Secara keseluruhan, peningkatan PAD memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan peningkatan belanja publik, dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antarwilayah agar setiap daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2024), seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan DAU yang stabil selama periode 2022–2024 dengan rata-rata kenaikan sekitar 8–12% per tahun. Kabupaten Brebes mencatat peningkatan tertinggi sebesar 18,95%, diikuti Grobogan 17,12% dan Batang 13,98%, yang mencerminkan adanya prioritas alokasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kenaikan DAU ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan, meskipun sebagian besar daerah di Jawa Tengah masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Secara keseluruhan, tren peningkatan DAU berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, memperluas kapasitas belanja publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah (2022–2024), seluruh kabupaten/kota di provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi positif selama periode tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan berkisar antara 9–11%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Batang (+11,89%), Kota Semarang (+11,71%), dan Kota Surakarta (+11,49%), yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi pasca-pandemi. Sebaliknya, pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Blora (+6,27%) dan Kudus (+5,03%) karena keterbatasan diversifikasi sektor ekonomi dan perlambatan industri lokal. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB yang stabil menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat, di mana sinergi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data setiap variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

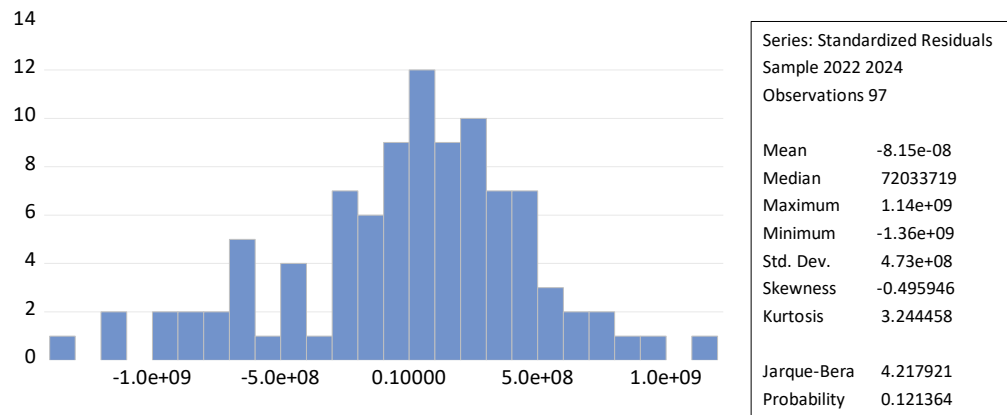
Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	105	6.890.000.000	75.000.000.000	25.300.000.000	12.800.000.000
Pendapatan Asli Daerah (X1)	105	237.000.000	904.000.000	409.000.000	127.000.000
Belanja Modal (X2)	105	75.200.000	567.000.000	251.000.000	99.700.000
Dana Alokasi Umum (X3)	105	410.000.000	1.410.000.000	914.000.000	231.000.000

Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar Rp 25,3 triliun, dengan sebaran cukup tinggi (SD = Rp 12,8 triliun). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar daerah kota besar seperti Semarang dan Surakarta memiliki kontribusi PDRB jauh lebih besar dibanding daerah seperti Wonosobo atau Banjarnegara. PAD rata-rata sebesar Rp 409 miliar, menggambarkan kemampuan fiskal daerah menengah, sedangkan DAU rata-rata sebesar Rp 914 miliar, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer pusat. Belanja modal relatif kecil (Rp 251 miliar rata-rata) sehingga efeknya terhadap PDRB cenderung jangka panjang.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan grafik P–P Plot menunjukkan pola sebaran residual yang mengikuti garis diagonal, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk uji regresi panel.



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan histogram pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa distribusi residual membentuk pola menyerupai lonceng (*bell-shaped curve*) yang terpusat di sekitar nilai nol. Hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi mendekati normal. Hal ini terlihat dari pola sebaran pada grafik P–P Plot yang mengikuti garis diagonal dan histogram yang membentuk kurva lonceng (*bell-shaped*). Nilai Jarque–Bera sebesar 4,217921 dengan probabilitas 0,121364 ($> 0,05$) mengonfirmasi bahwa tidak terdapat penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Artinya, model regresi panel yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid tanpa bias akibat distribusi residual yang ekstrem.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance
PAD (X1)	1.557646	0.642
Belanja Modal (X2)	1.498561	0.667
DAU (X3)	1.334614	0.749

Berdasarkan hasil tabel 2 di atas, Seluruh variabel memiliki nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan Tolerance di atas 0,1 (PAD = 1,55; Belanja Modal = 1,49; DAU = 1,33). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear kuat antarvariabel bebas dalam model. Dengan demikian, setiap variabel mampu memberikan kontribusi unik dalam menjelaskan variasi PDRB tanpa saling tumpang tindih. Hal ini memastikan keandalan model regresi dan memperkuat validitas interpretasi pengaruh PAD, Belanja Modal, serta DAU terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
PAD (X1)	0.4335	0.670	0.505
Belanja Modal (X2)	0.5757	1.215	0.229

DAU (X3)	1.0809	1.244	0.218
----------	--------	-------	-------

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil Uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi (Sig.) di atas 0,05, yaitu PAD (0,505), Belanja Modal (0,229), dan DAU (0,218). Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varians residual antar observasi. Dengan kata lain, varians galat bersifat homogen, dan model regresi tidak terdistorsi oleh adanya penyebaran data yang tidak merata. Kondisi ini penting agar estimasi parameter tetap efisien serta nilai standar error tidak bias.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

DU	DW	4-DU	Keputusan
1.7335	2.0836	2.2665	Tidak ada autokorelasi

Berdasarkan tabel 4 di atas, Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,0836, yang berada di antara DU (1,7335) dan 4-DU (2,2665), menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi. Artinya, tidak ada hubungan sistematis antara error satu observasi dengan observasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa model sudah stabil dan tidak mengalami masalah korelasi serial yang dapat menyebabkan bias pada koefisien regresi.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 5. Regresi Data Panel

Jenis Uji	Statistik	df	Prob.
Cross-section F	765.4416	(32,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	581.7868	32	0.0000

Probabilitas < 0.05 → tolak Common Effect, gunakan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6. Random Effect Model

Jenis Uji	Chi-Sq. Statistic	df	Prob.
Cross-section random	17.3218	3	0.0006

Dari hasil uji Chow (Cross-section F dan Chi-square) dengan probabilitas < 0,05, model Common Effect ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) dipilih karena lebih sesuai menggambarkan perbedaan karakteristik antar daerah. Selanjutnya, uji Hausman menunjukkan nilai Chi-Square = 17,3218 dengan Prob. = 0,0006 (< 0,05), yang berarti model Random Effect juga ditolak. Maka, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), karena dianggap paling mampu menangkap efek spesifik tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel umum.

Hasil Regresi Data Panel (Model FEM)

Tabel 7. Regresi Linier Berganda (Model FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.78E+09	1.89E+09	1.998878	0.0501
X1	4.710584	1.643442	2.866292	0.0057
X2	-1.030563	1.203273	-0.856467	0.3951
X3	21.75673	2.207086	9.857675	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	4.71E+08	R-squared		0.998626
Mean dependent var	2.53E+10	Adjusted R-squared		0.997837
S.D. dependent var	1.28E+10	S.E. of regression		5.94E+08
Akaike info criterion	43.52087	Sum squared resid		2.15E+19
Schwarz criterion	44.47643	Log likelihood		2074.762
Hannan-Quinn criter.	43.90725	F-statistic		1266.260
Durbin-Watson stat	2.083636	Prob(F-statistic)		0.000000

Berdasarkan tabel diatas, Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa PAD (X1) dan DAU (X3) berpengaruh positif serta signifikan terhadap PDRB, masing-masing dengan p-value 0,0057 dan 0,0000. Ini menandakan bahwa peningkatan PAD dan dana transfer pusat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, Belanja Modal (X2) memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan ($p = 0,3951$), yang berarti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak langsung atau membutuhkan waktu jangka panjang untuk terlihat. Nilai $R^2 = 0.9986$ menunjukkan bahwa 99,86% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, menandakan model sangat kuat. Nilai Durbin-Watson = 2,08 juga menguatkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa PAD dan DAU menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah, sementara belanja modal cenderung belum memberikan efek nyata dalam periode penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0057 ($< 0,05$). Artinya, semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PDRB daerah tersebut. Hal ini karena PAD merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan menjadi modal penting dalam membiayai program pembangunan serta pelayanan publik. Menurut penelitian Wiraswasta, Pudjihardjo, & Adis (2019), peningkatan PAD secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah karena pemerintah memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk membiayai sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Alvaro & Wibowo (2020) yang menyatakan bahwa PAD berkontribusi besar dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan efisiensi pembangunan daerah. Selain itu, Wati & Fajar (2017) juga menemukan bahwa peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena memperkuat kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsi desentralisasi fiskal. Secara empiris, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan PAD di beberapa daerah seperti Klaten, Karanganyar, dan Brebes beriringan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi selama 2022–2024. Hal ini membuktikan bahwa daerah dengan pendapatan asli yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi melalui belanja pembangunan dan investasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD, semakin besar pula pertumbuhan ekonomi daerah, karena dana yang dikelola dari sumber lokal mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,0000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui DAU mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menurut penelitian Yuliantoni & Arza (2021), Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan output ekonomi karena berfungsi sebagai alat pemerataan fiskal antar daerah. Ketika daerah menerima DAU yang cukup besar, maka belanja pemerintah untuk layanan publik juga meningkat, sehingga mendorong produktivitas masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Andriana (2020) yang menjelaskan bahwa peningkatan DAU membantu daerah dengan kapasitas PAD rendah untuk tetap mampu membiayai belanja pembangunan dan pelayanan dasar. Penelitian lain oleh Vanesha, Rahmadi, & Parmadi (2019) juga menegaskan bahwa DAU berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB daerah. Dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar kabupaten/kota masih menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Namun, peningkatan rata-rata DAU sebesar 8–12% per tahun selama periode 2022–2024 menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat desentralisasi fiskal. Dengan demikian, DAU berperan sebagai instrumen pemerataan dan pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah yang belum memiliki PAD yang kuat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai signifikansi 0,3951 ($> 0,05$). Meskipun secara teoritis belanja modal seharusnya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan aset produktif, dalam praktiknya realisasi belanja modal di Jawa Tengah masih rendah dan tidak merata. Menurut penelitian Dewi & Suputra (2017), belanja modal sering kali belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar dialokasikan pada proyek yang bersifat non-produktif atau belum tepat sasaran.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Andriana (2020) yang menyatakan bahwa tingginya proporsi belanja rutin dibandingkan belanja modal menyebabkan efek belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. Sementara itu, Alvaro & Wibowo (2020) menemukan bahwa meskipun belanja modal berperan dalam meningkatkan aset publik, dampaknya terhadap PDRB baru terasa dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan belanja modal selama 2022–2024, seperti Kabupaten Cilacap, Boyolali, Grobogan, dan Blora. Kondisi tersebut menandakan bahwa sebagian besar anggaran pemerintah daerah masih difokuskan pada belanja operasional dan pegawai, bukan pada investasi jangka panjang yang produktif. Dengan demikian, rendahnya alokasi belanja modal menyebabkan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam jangka pendek.

Dari keseluruhan hasil uji dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dua faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, sementara Belanja Modal belum menunjukkan pengaruh yang berarti. Secara umum, penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD serta penggunaan DAU yang produktif diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan pembangunan, sementara DAU berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dengan kemampuan PAD yang masih terbatas. Ketidaksignifikanan Belanja Modal diduga karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan realisasi anggaran yang belum optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode observasi yang pendek, cakupan wilayah yang terbatas, serta variabel penelitian yang belum mencakup faktor-faktor makroekonomi lain. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, menambah variabel seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan investasi swasta, serta memperhatikan kualitas data agar hasil analisis lebih komprehensif. Bagi pemerintah daerah, peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset lokal perlu diperkuat untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Lucky. 2024. "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Untuk Kesenjangan Pembangunan". Melalui [13/10/2024]
- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.102>

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213–224. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15210>
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. [Publication details needed].
- Oktavianus Pasaloran. (2001). Teori Stewardship. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 9, Issue 2, pp. 1–14).
- Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 16–35.
- Putu, N. P. K. J. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal. 1, 79–92.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Sukmawati, N., Naryono, E., & Sukabumi, P. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 23–43.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.